

EVALUASI TUGAS BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) BAGIAN PEMBERDAYAAN PADA DINAS KOPERASI INDUSTRI DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

RAMADANI

Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam
Kuantan Singingi Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kec.
Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi.
Email : ramadaniranhy@gmail.com

ABSTRACT

Cooperatives are legal entities based on family principles whose members consist of individuals or cooperative legal entities, by separating the wealth of their members as capital to run businesses that meet aspirations and needs in the economic, social and cultural fields in accordance with cooperative values and principles. Micro, Small and Medium Enterprises stated that what is meant by micro business is productive business owned by individuals and / or individual business entities that meet the criteria of micro business. This type of research is a qualitative research method. Researchers conducted research using interview, observation and documentation data collection methods. The data analysis method used by researchers in this study is an interactive model analysis. The purpose of this thesis is to find out how the implementation of tasks in the field of Cooperatives and SMEs. And based on the results of field research regarding the Evaluation of the Task for the Field of Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) the Empowerment Section of the Industrial and Trade Cooperative Office of Kuantan Singingi Regency was not well implemented.

Keywords : evaluation, the task of the fields of cooperatives and MSM

ABSTRAK

Koperasi merupakan badan hukum yang berdasarkan atas asas kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum koperasi, dengan memisahkan kekayaan anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan tugas di bidang Koperasi dan UMKM. Dan berdasarkan hasil penelitian dilapangan mengenai Evaluasi Tugas Bidang Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Bagian Pemberdayaan Pada Dinas Koperasi Industri Dan Perdagangan Kabupaten Kuantan Singingi Tidak Terlaksana Dengan Baik.

Kata kunci : Evaluasi, Tugas Bidang Operasi dan UMKM

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas asas kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum koperasi, dengan memisahkan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh anggotanya, dimana setiap anggotanya memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dalam pasal 4 disebutkan bahwa Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Dan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai tugas membantu kepala Dinas Dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, memfasilitasi, pembinaan, pemberdayaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Dalam menjalankan tugas tersebut, bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) belum melaksanakan tugas pemberdayaan dengan baik. Karena semakin banyaknya koperasi yang tidak berjalan lagi atau yang berstatus non aktif. Hingga per Desember 2018 peneliti menemukan ada 145 koperasi yang masih aktif dari jumlah keseluruhan 208 koperasi yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk mencapai tujuan utama koperasi yakni untuk mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi sangatlah bergantung pada pegawai serta Kepala bidang Koperasi dan UMKM dalam menjalankan tugas untuk membantu kerja Kepala Dinas. Dalam melakukan penelitian ini, penulis berfokus pada tugas kepala bagian koperasi dan UMKM yang akan menjadi sumber utama dalam kemajuan dan perkembangan koperasi di

Kuantan Singingi, juga bagaimana kebijakan yang diambil dapat membantu mewujudkan tujuan utama didirikannya koperasi di Kuantan Singingi.

LANDASAN TEORI

Tinjauan Teori

Teori/ Konsep Administrasi Negara

Gerald Caiden (dalam Juharni, 2015 : 3) mengungkapkan bahwa Administrasi Negara merupakan fungsi dari pembuatan keputusan, perencanaan, perumusan tujuan dan sasaran, peenggalangan kerja sama dengan DPR dan organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk memperoleh dukungan rakyat dan dana bagi program pemerintah, pemantapan dan jika perlu perubahan organisasi, pergerahan dan pengawasan pegawai, kepemimpinan, komunikasi, pengendalian dan lain-lain, fungsi yang dijalankan oleh lembaga eksekutif dan lembaga pemerintah lainnya.

Teori / Konsep Kebijakan

Masalah kebijakan adalah kebutuhan, nilai-nilai, atau Kesempatan yang tidak terealisasi tetapi yang dapat dicapai melalui tindakan publik. Konsekuensi dari tindakan kebijakan tidak pernah diketahui secara penuh, dan oleh karena itu memantau tindakan kebijakan merupakan suatu keharusan.

Teori / Konsep Evaluasi

Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum, istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assesment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

Teori / Konsep Organisasi

Soedjadi (dalam Ngusmanto, 2017 : 21) menegaskan bahwa organisasi dapat juga dipandang sebagai suatu sistem dan bentuk hubungan antara wewenang dan tanggung jawab antara atasan dan bawahan dalam rangka pencapaian tujuan dengan cara yang sudah ditetapkan dan yang paling efisien.

Teori/ Konsep Pemberdayaan

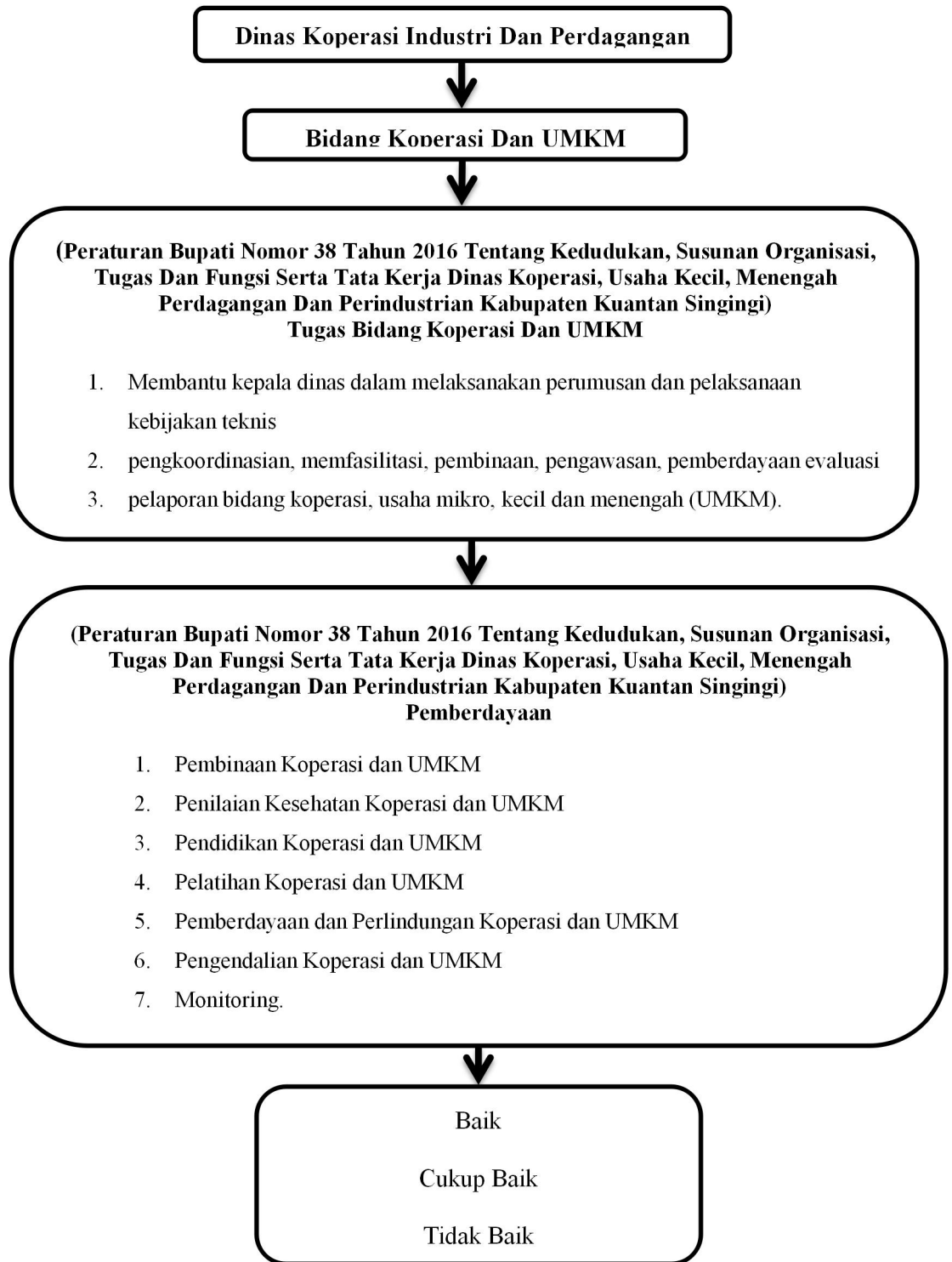
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemberdayaan merupakan proses, cara, perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak berupa akal, ikhtiar, atau upaya. Sedangkan menurut Pemdagri Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 8 tentang kader pemberdayaan masyarakat menyatakan pemberdayaan adalah suatu strategi yang digunakan untuk pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Teori / Konsep Koperasi

Koperasi merupakan badan hukum yang berdasarkan atas asas kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum koperasi, dengan memisahkan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk

menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Kerangka Pemikiran



Sumber : Modifikasi Peneliti 201

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dimana dalam penelitian ini hanya bersifat deskriptif yang hanya memberikan gambaran tentang permasalahan yang akan diteliti. Menurut Sugiyono (2010:1) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik (utuh), dengan mendeskripsikan data dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Informan

Informan penelitian adalah subyek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah semua pegawai yang berhubungan dengan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Keterangan informan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No.	Jabatan Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	Kabid Koperasi & Umkm	1	20%
2.	Kasi Usaha Mikro, Kecil & Menengah	1	20%
3.	Kasi Koperasi	1	20%
4.	Kasi Pengawasan	1	20%
5.	Staff	1	20%
Jumlah		5	100%

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2019

Teknik penarikan sampel untuk informan di atas adalah teknik Purposive Sampling. Teknik purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau pengambilan sampel dengan mendasar pada usaha pencapaian tujuan penelitian. Informan yang dipilih dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data.

Sumber Data

Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden berupa:

1. Identitas Responden
2. Tugas Bidang Koperasi dan UMKM
3. Jumlah Koperasi yang masih aktif

Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data pendukung yang berhubungan dengan penelitian dan berupa penjelasan umum seperti :

1. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Umk Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi

2. Data Pegawai

Fokus Penelitian

Menurut Rachmat Trijono (2015:153) mengatakan bahwa dalam suatu penelitian tidak mungkin peneliti meneliti semua permasalahan dalam suatu program atau kebijakan. Oleh karena itu peneliti perlu menetapkan fokus permasalahan yang mencakup aspek-aspek apa yang akan dievaluasi pada suatu program atau kebijakan. Fokus penelitian dinyatakan dalam bentuk pernyataan maka Fokus penelitian ini adalah Evaluasi Tugas Bidang Koperasi Dan Usaha Amikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Bagian Pemberdayaan Pada Dinas Koperasi Industri Dan Perdagangan Kabupaten Kuantan Singingi.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah, Kabupaten Kuantan Singingi.

Metode Pengumpulan Data

Wawancara

Menurut Esterberg (dalam sugiyono, 2009 : 317) mengemukakan bahwa wawancara peertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jaawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Observasi

Menurut S. Margono (dalam Zuriah, 2005 : 173) observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa.

Dokumentasi

Menurut Usman (2011 : 69) teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini peneliti mengambil data-data yang dibutuhkan untuk penelitian berupa data pegawai dan struktur organisasi.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif. Menurut huberman dan miles (dalam Muhammad Idrus, 2009 :147) anallisis model interaktif merupakan analisis data kualitatif yang terdiri dari tiga hal utama, yaitu :

Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan.

Penyajian Data (Display Data)

Penyajian Data (*Display Data*) merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut huberman dan miles hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh.

HASIL PENELITIAN

Indikator Pemberdayaan

Pembinaan Koperasi dan UMKM

Pembinaan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Kabupaten Kuantan Singingi memang telah dilakukan sebagaimana yang dijelaskan oleh informan diatas, namun tidak terlaksana dengan baik. Dalam usaha untuk memberdayakan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perkembangan iklim usaha belum sepenuhnya mendukung, antara lain: (1) belum tuntasnya penyempurnaan peraturan perundangan tentang koperasi dan UMKM, termasuk peraturan turunannya; (2) ketidakjelasan aspek legalitas formal dan prosedur perizinan bagi koperasi dan UMKM, termasuk masih banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi dan prosedur yang panjang; serta (3) masih berlangsungnya peraturan-peraturan daerah yang menghambat, termasuk pengenaan pungutan-pungutan baru kepada koperasi dan UMKM sebagai sumber pendapatan asli daerah. Hal tersebut mengakibatkan tingginya biaya transaksi. Namun untuk sekarang pengurusan izin yang berhubungan dengan usaha maupun dengan pendirian koperasi sudah ditiadakan tapi tetap saja masih banyak proses yang harus dilewati, karena hal inilah yang menyebabkan banyak nya UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi yang belum mengantongi izin usaha.

Penilaian Kesehatan Koperasi dan UMKM

Penilaian kesehatan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dilakukan oleh Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Kabupaten Kuantan Singingi masih belum maksimal. Hal ini peneliti simpulkan karena menurut penjelasan informan memang sudah ditetapkan penilaian khusus untuk mengatur nilai koprasi yang dikategorikan sehat sampai yang dikategorikan sebagai koperasi tidak sehat. Dan dijelaskan pula bahwa sampai sekarang belum ada koperasi yang memenuhi nilai untuk dikategorikan sebagai koperasi yang sehat. Peneliti berkesimpulan bahwa penilaian kesehatan yang diharapkan juga belum makasimal. Apalagi berdasarkan keterangan informan diatas, penilaian khusus untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) belum tersedia seperti penilaian khusus terhadap Koperasi, padahal koperasi yang memiliki penilaian khusus saja masih belum ada yang termasuk kategori yang benar-benar sehat apalagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tidak memiliki penilaian. Maka dari itu setidaknya penulis berfikir agar disediakan penilaian terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau paling tidak proses penilaiannya disamakan dengan penilaian koperasi saja agar lebih mudah.

Pendidikan Tentang Koperasi dan UMKM

Pendidikan tentang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sudah lumayan baik, jenis pendidikan yang diberikan juga sudah sesuai dengan kebutuhan para pelaku koperasi dan UMKM yang ada. Menurut penulis masalah pokok yang dihadapi dalam kopeasi adalah masih belum meluasnya pemahaman tentang koperasi sebagai badan usaha yang memiliki struktur kelembagaan dan insentif yang unik/khas dibandingkan badan usaha lainnya, serta kurang memasyarakatnya informasi tentang praktik-praktik berkoperasi yang benar yang mengakibatkan rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi

koperasi. Serta masalah keorganisasian koperasi yang tidak semua orang menguasainya, dan dengan pendidikan ini pelaku dan anggota koperasi di ajari semua hal mengenai koperasi ini dari dasar hingga benar-benar mengerti dan paham bagaimana berorganisasi dan bagaimana cara memanfaatkan keadaan dengan kemampuan sumber daya manusia yang sudah dibekali.

Pelatihan Koperasi dan UMKM

Pelatihan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dilakukan oleh Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Kabupaten Kuantan Singingi menurut peneliti masih kurang maksimal meskipun pelatihan yang diberikan sudah cocok dengan sistem Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada. Selain pelatihan yang sudah ada, menurut peneliti meningkatkan pemahaman tentang koperasi dan UMKM pada masyarakat juga tidak kalah penting. karena jika masyarakat tahu arti penting Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) maka masyarakat akan lebih antusias lagi dan dapat meningkatkan kinerja Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga untuk kedepannya. Dalam usaha memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perlu juga untuk mengembangkan kewirausahaan agar lebih produktif dalam membangun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang diharapkan.

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan UMKM

Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dilakukan oleh Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Kabupaten Kuantan Singingi adalah belum maksimal dilakukan. Menurut peneliti perlindungan yang dapat dilakukan untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak bisa jika hanya dengan monitoring saja, tapi bisa juga dengan menyempurnakan peraturan perundang-undangan untuk membangun landasan legalitas usaha yang kuat bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta menyederhanakan birokrasi dan perizinan. Menurut peneliti hal ini lebih membantu untuk melindungi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi ini.

Pengendalian Koperasi dan UMKM

Pengendalian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dilakukan oleh Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Kabupaten Kuantan Singingi masih belum memuaskan walaupun proses pengendalian yang dilakukan sudah cukup baik. Peneliti menilai bahwa Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) beranggapan bahwa monitoring atau proses tinjauan langsung mereka ke lapangan adalah bentuk pengendalian dan seperti yang dijelaskan pada sub indikator perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga menyebutkan bahwa monitoring adalah bentuk perlindungan mereka terhadap Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), karena itu peneliti beranggapan bahwa proses perlindungan dan pengendalian tidak terlaksana dengan baik karena perlindungan dan pengendalian adalah dua proses yang berbeda, tapi disini Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Kecil dan Menengah (UMKM) menjadikannya sama dengan membuat monitoring sebagai cara untuk mewujudkan proses tersebut walaupun Rapat Anggota Tahunan (RAT)nya tetap terlaksana secara rutin, tetap menjadikan proses pengendalian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) belum terlaksana secara maksimal.

Monitoring

Monitoring yang dilakukan oleh Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Kabupaten Kuantan Singingi sudah cukup baik meskipun proses monitoring yang dilakukan secara rutin yang dijelaskan oleh informan tidak diketahui waktu pastinya dan dilakukan secara acak. Monitoring perlu dilakukan secara periodik dan berkelanjutan, tidak terhenti pada selesainya program dilaksanakan dan pelaporan saja, namun pasca pelaksanaannya juga tetap dimonitor dan dievaluasi progressnya. Sehingga dari hasil monitoring ini selain dapat menjadi acuan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), juga dapat menstimulir adanya pengembangan program yang lebih inovatif dalam pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). pelaksanaan monitoring adalah tugas dan tanggungjawab bersama, bukan hanya Kementerian dan pemda yang memiliki dan melaksanakan program di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). tetapi juga para pelaku Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai mitra program juga sangat diharapkan peran sertanya dalam pelaksanaan monitoring.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan mengenai Evaluasi Tugas Bidang Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Dinas Koperasi Industri Dan Perdagangan Kabupaten Kuantan Singingi terutama dibagian pemberdayaannya tidak terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustno, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Anoraga, Pandji, dan Piji. 2003. *Pengantar Pasar Modal*. Jakarta : Rineka Cipta
- Arifin, Johar. 2002. *Manajemen Koperasi*. Jakarta: Gramedia.
- Asyiah, Nur. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta : Deepublish.
- Bhinadi, Ardito. 2017. *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : Deepublish.
- Dunn, William N. 2003. *Penngantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Fahmi, Irham. 2016. *Perilaku Organisasi Teori, Aplikasi, dan Kasus*. Bandung : Alfabeta.
- Harsoyo, Y, dkk. 2006. *Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan*. Yogyakarta : Pusaka Widyatama.
- Hubeis. Musa. 2009. *Prospek Usaha Kecil dalam wadah Inkubator Bisnis*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Juharni. 2015. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Makasar : CV Sah Media.

- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhammad, Sahri dkk. 2014. *Pemberdayaan tujuh (Saptagon/Heptagon) Akses Rumah Tangga Miskin, Penguatan ekonomi rumah tangga untuk penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan*, Malang : UB Press.
- Mustopadidjaja AR. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi. Dan Evaluasi Kerja*. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara Duta Pertiwi Foundation.
- Nawi, Rusdin. 2017. *Perilaku Kebijakan Organisasi*. Bandung : Eksis Media Grafisindo.
- Ngusmanto. 2017. *Teori Perilaku Organisasi Publik*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Riniwati, Harsuko. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Aktivitas utama dan pengembangan SDM)*. Malang : UB : Press.
- Salamoen, Soeharyo dan Nasri Efendi. 2009. *Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Sattar. 2017. *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*. Yogyakarta : Deepublish.
- Sore, Uddin B dan Sabirin. 2017. *Kebijakan publik*. Makasar : CV Sah Media.
- Sugiyono. 2010. *Metode penelitian administrasi*. Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode penelitian administrasi*. Bandung. Alfabeta.
- Suryabrata, Sumadi. 2016. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Tambunan, Tulus. 2009. *UMKM di Indonesiadan Beberapa Isu Penting*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ulum, M Chazienui. 2016. *Perilaku Organisasi : Menuju Orientasi Pemberdayaan*. Malang : UB Press
- Wibowo, Martino dan Ahmad Subagyo. 2017. *Seri Manajemen Koperasi dan UKM Tata Kelola Koperasi Yang Baik (Good Cooperative Governance)*. Yogyakarta : Deepublish.
- Zuriah, Nurul. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*. Jakarta : PT Bumi Aksara.

Dokumentasi

- Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia NOMOR : 21/Per/M.KUKM/X/2008 Tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang
Perkoperasian.

UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Internet

<http://books.google.co.id> di akses pada hari sabtu tanggal 13 April 2019, pukul
08.28 WIB.

<http://books.google.co.id> di akses pada hari sabtu tanggal 23 Februari 2019, pukul
14.00 WIB.

<http://diskoperindagkuansing.blogspot.com/p/perindustrian.html> di akses pada
hari rabu 25 September 2019 pukul 19.30 WIB.

<http://informazone.com/jenis-jenis-koperasi/> di akses pada hari sabtu tanggal 20
April 2019 pukul 13.15 WIB.

[http://ksusyariahzatadini.wordpress.com/2007/06/18/undang-undang-koperasino-
25-tahun-1992](http://ksusyariahzatadini.wordpress.com/2007/06/18/undang-undang-koperasino-25-tahun-1992) di akses pada hari rabu tanggal 16 Oktober 2019 pukul
14.45 WIB.

www.memoarema.com/30525/273-091-umkm-serap-469-274-pekerja.html,
diakses senin tanggal 14 Oktober 2019 pukul 14.00 WIB